



# E-PAPER PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://epaper.dpr.go.id>

---

**Judul** : PEMBIAYAAN PROPERTI, TAPERA SOKONG PROGRAM SEJUTA RUMAH  
**Tanggal** : Jumat, 10 Juli 2020  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 7

Bisnis, JAKARTA — Kementerian PUPR meyakini bisa membangun 5 juta unit rumah selama periode 2020--2024 seiring dengan peluncuran program Tabungan Perumahan Rakyat. Yanita Petriella yanita.petriella@bisnis.com Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Khalawi Abdul Hamid mengatakan total anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah kekurangan jumlah rumah (backlog) mencapai Rp552,7 triliun. Dengan itu, dia menyatakan pemerintah akhirnya meluncurkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). "Tapera salah satu solusi ke depan untuk mengatasi masalah backlog," ujarnya dalam RDP Komisi V DPR, Kamis (9/7). Selama 2020-2024, Khalawi memaparkan APBN yang dialokasikan untuk perumahan hanya Rp54 triliun atau 9,7% dari total kebutuhan dana. Dengan itu, dia memperkirakan hanya bisa membangun 870.000 unit rumah, sedangkan kebutuhannya bisa mencapai di atas jumlah itu. "Ini dibutuhkan tambahan pembiayaan di luar anggaran dari pemerintah untuk menutupi kekurangan lainnya," ucapnya. Selama ini, dia menambahkan ada pertumbuhan jumlah keluarga baru setiap tahun sekitar 700.000 kepala keluarga (KK) yang juga membutuhkan rumah. "Ini jadi dilema karena program sejuta rumah enggak cukup mesti ada inovasi lain. Makanya ada Tapera." Sepanjang tahun ini, Khalawi menargetkan bisa membangun 330.000 unit rumah sebagai upaya bantuan pembiayaan perumahan pada masa pandemi Covid-19. Jumlah itu terdiri atas alokasi FLPP sebanyak 88.000 unit, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebanyak 67.000 unit, dan tambahan stimulus fiskal melalui subsidi selisih bunga (SSB) sebanyak 175.000 unit. "Untuk SSB yang sebanyak 175.000 unit ini anggarannya Rp1,5 triliun." Selama adaptasi kebiasaan baru, dia menyatakan akan mempercepat pembangunan rumah susun untuk eksTNI dan Polri guna memberikan pasar juga para pengembang swasta. Sejauh ini, dia memaparkan ada kendala lahan di kota besar yang dikuasai pengembang kakap sehingga menyulitkan membangun rumah untuk MBR. Sementara itu, Komisioner Badan Pengelola Tapera Adi Setianto memproyeksikan peserta Tapera hingga 2024 mencapai 13,1 juta peserta dengan dana kelolaan Rp60 triliun. Khusus untuk pegawai swasta, ada aturan setelah 7 tahun PP diterbitkan baru wajib menjadi peserta Tapera. Wakil Ketua Komisi V DPR Nurhayati Monoarfa meminta BP Tapera memperjelas kewajiban iuran serta alokasi operasionalnya. "Ini karena gaji masyarakat dipotong dan mereka harus dapat sesuai dengan haknya dan juga dirinci sehingga mereka tahu kapan bisa beli rumah," katanya.